

Indonesia: Lindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender online secara lebih efektif

26/09/2023

Pihak berwenang Indonesia harus memastikan bahwa perempuan dilindungi secara efektif dari kekerasan berbasis gender online (KBGO) melalui implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan mengatasi kekurangan UU TPKS sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional, *International Commission of Jurists (ICJ)* menyatakan dalam *briefing paper* yang diterbitkan hari ini.

Dalam *briefing paper* berjumlah tiga puluh halaman yang menganalisis UU TPKS, ICJ mengidentifikasi beberapa kekurangan dari UU TPKS terkait dengan penanganan KBGO, dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak berwenang Indonesia tentang bagaimana Indonesia dapat meningkatkan upaya untuk memenuhi kewajiban hukum hak asasi manusia internasional untuk mencegah dan menghukum tindakan KBGO.

"Meskipun UU TPKS merupakan langkah yang benar dalam upaya pencegahan dan penghukuman KBGO terhadap perempuan di Indonesia, masih banyak yang masih harus dilakukan untuk secara efektif melindungi perempuan dari segala bentuk KBGO, dan untuk memastikan bahwa korban/penyintas dapat mengakses keadilan dan upaya hukum," Kata Daron Tan, Associate International Legal Adviser ICJ.

UU TPKS berlaku pada Mei 2022. Undang-undang mengkriminalisasi tindakan kekerasan seksual, termasuk beberapa bentuk KBGO. Antara lain, UU TPKS juga menjamin perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban/penyintas tindak kekerasan seksual tertentu.

Briefing paper ICJ menggarisbawahi bahwa tindakan KBGO melanggar hak asasi manusia korban/penyintas yang dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional. Indonesia memiliki kewajiban hukum hak asasi manusia internasional untuk mencegah tindakan KBGO, dan untuk menyelidiki, menuntut dan menghukum KBGO ketika itu terjadi.

Briefing paper mengidentifikasi kekurangan tertentu dalam UU TPKS yang membutuhkan perbaikan agar lebih efektif menangani KBGO, termasuk ruang lingkup tindakan KBGO yang sempit dalam UU TPKS dan kebutuhan untuk memastikan bahwa implementasi UU TPKS sensitif gender.

"Peraturan Pemerintah untuk menerapkan UU TPKS, yang saat ini sedang dirumuskan dengan tujuan untuk disahkan sebelum akhir tahun 2023, memberikan peluang besar bagi pihak berwenang Indonesia untuk memastikan bahwa UU TPKS dapat menangani tindakan KBGO dengan lebih baik sejalan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan hukum dan standar hak asasi manusia internasional," tambah Yogi Bratajaya, Legal Consultant ICJ.

Briefing paper ICJ juga menganalisis tanggung jawab hak asasi manusia perusahaan teknologi, seperti Meta, X (sebelumnya Twitter) dan TikTok, untuk mencegah dan mengatasi tindakan KBGO. Kegiatan perusahaan-perusahaan ini memiliki resiko untuk fasilitasi tindakan KBGO terhadap perempuan, seperti amplifikasi konten yang bermuatan KBGO atau mengungkapkan bukti KBGO di platform mereka.

Briefing paper ini memberikan rekomendasi konkret kepada pihak berwenang Indonesia tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan ketentuan dan implementasi UU TPKS sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional untuk secara efektif melindungi perempuan dari KBGO. *Briefing paper* juga memberikan rekomendasi kepada perusahaan teknologi tentang bagaimana mereka dapat memenuhi tanggung jawab mereka berdasarkan standar hak asasi

manusia internasional untuk mencegah tindakan KBGO dan secara efektif mengatasinya ketika KBGO terjadi.

Peluncuran *Briefing Paper*

Briefing paper diluncurkan pada 26 September 2023. Peluncuran ini mencakup diskusi panel, yang mempertemukan organisasi hak perempuan, jurnalis, pengacara, dan perwakilan perusahaan teknologi untuk membahas upaya di Indonesia untuk melindungi perempuan dari KBGO dan memastikan akses terhadap keadilan bagi korban/penyintas.

Panelist saat acara peluncuran adalah:

- Daron Tan, Associate International Legal Adviser, ICJ;
- Yogi Bratajaya, Legal Consultant, ICJ;
- Andy Yetriyani, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- Uli Pangaribuan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta;
- Endy Bayuni, Anggota Oversight Board; dan
- Nani Afrida, Editor in Chief, Independen.id

Unduh

Briefing paper penuh dapat diunduh dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (PDF).

Kontak

Daron Tan, ICJ Associate International Legal Adviser, e: daron.tan@icj.org

Yogi Bratajaya, ICJ Legal Consultant, e: yogi.bratajaya@icj.org